



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS HARMONI

HADIRKAN AKSI RESPONSIF MELALUI
OPTIMALISASI NARASI DAN INFORMASI

BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN EKONOMI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap instansi pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Transparansi informasi menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan desa. Berbagai kegiatan seperti pelatihan, pembinaan desa, pendampingan kelembagaan desa, serta penguatan ekonomi desa secara rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian desa. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya terdokumentasi dan terpublikasi secara optimal kepada masyarakat luas.

Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya akses informasi bagi masyarakat terkait program dan kegiatan pemberdayaan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa menjadi belum optimal, serta pemahaman publik terhadap peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa masih relatif terbatas.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya telah menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan luas. Media sosial juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterjangkauan informasi publik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media strategis dalam penyebaran informasi kegiatan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas publikasi kegiatan pemberdayaan desa secara modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, dihadirkan inovasi **HARMONI Pemberdayaan (Hadirkan Aksi Responsif melalui Optimalisasi Narasi dan Informasi)** sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Inovasi HARMONI Pemberdayaan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama publikasi kegiatan serta didukung teknologi digital seperti QR Code yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumentasi kegiatan secara lebih lengkap. Dengan demikian, informasi

yang disampaikan menjadi lebih transparan, menarik, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Nama HARMONI memiliki makna sebagai simbol sinergi dan keselarasan antara pemerintah, masyarakat, dan desa dalam membangun proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui inovasi ini diharapkan tercipta sistem publikasi kegiatan pemberdayaan yang lebih terbuka, informatif, partisipatif, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

TUJUAN INOVASI

Inovasi HARMONI Pemberdayaan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan publikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Menyediakan media informasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan pemberdayaan desa.
4. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait program pemberdayaan desa.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.
6. Membangun sistem dokumentasi digital kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

MANFAAT INOVASI

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - Mempermudah publikasi program pemberdayaan desa kepada masyarakat.
 - Mendukung transparansi kegiatan pemerintah daerah.
 - Menjadi media dokumentasi kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah Desa
 - Memperoleh informasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
 - Meningkatkan pemahaman terhadap program pembangunan desa.
3. Bagi Masyarakat
 - Mendapatkan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses mengenai kegiatan pemberdayaan desa.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

4. Bagi Instansi

Meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Waktu
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-1 April 2024
2	Identifikasi Masalah	Minggu ke-2 April 2024
3	Observasi Lapangan	Minggu ke-4 April 2024
4	Uji Coba	Minggu ke-3 Mei 2024
5	Penerapan	Minggu ke-4 Juni 2024

SKEMA PELAKSANAAN INOVASI

Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan
 - a. Identifikasi kebutuhan publikasi kegiatan.
 - b. Penyusunan konsep inovasi.
 - c. Penyiapan media sosial resmi dan perangkat pendukung.
2. Tahap Pengembangan
 - a. Pembuatan konten publikasi kegiatan.
 - b. Penyusunan dokumentasi digital kegiatan.
 - c. Pembuatan QR Code dokumentasi.
3. Tahap Implementasi
 - a. Publikasi kegiatan melalui media sosial.
 - b. Penyebaran QR Code dokumentasi kegiatan.
 - c. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa.
4. Tahap Evaluasi
 - a. Evaluasi efektivitas publikasi digital.
 - b. Pengembangan konten dan sistem publikasi secara berkelanjutan.

MEDIA DAN PLATFORM YANG DIGUNAKAN

Pelaksanaan inovasi ini memanfaatkan beberapa media digital, yaitu:

1. Instagram sebagai media publikasi visual dan informasi singkat kegiatan.
2. Facebook sebagai media publikasi yang menjangkau masyarakat luas.
3. TikTok sebagai media video pendek yang informatif dan edukatif.
4. QR Code sebagai media akses cepat menuju dokumentasi kegiatan secara lengkap.

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

1. Kegiatan Pemberdayaan DPMD

Alur dimulai dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kegiatan ini dapat berupa pelatihan, pembinaan desa, pendampingan kelembagaan, maupun program penguatan ekonomi desa yang dilaksanakan sesuai dengan agenda kerja pemerintah daerah.

2. Dokumentasi Kegiatan (Foto, Video, Narasi)

Setiap kegiatan yang dilaksanakan kemudian didokumentasikan secara lengkap dalam bentuk foto, video, dan narasi kegiatan. Dokumentasi ini bertujuan untuk merekam seluruh proses kegiatan agar dapat dijadikan bahan informasi dan publikasi yang akurat, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Publikasi melalui Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok)

Hasil dokumentasi yang telah disusun kemudian dipublikasikan melalui media sosial resmi DPMD seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Konten yang diunggah disajikan secara menarik, informatif, dan komunikatif agar dapat menjangkau masyarakat secara luas serta meningkatkan pemahaman publik terhadap kegiatan pemerintah daerah.

4. Pembuatan QR Code Dokumentasi Kegiatan

Setelah publikasi dilakukan, setiap kegiatan juga dibuatkan QR Code yang berisi tautan menuju dokumentasi lengkap kegiatan. QR Code ini berfungsi sebagai media akses cepat yang menghubungkan masyarakat dengan informasi yang lebih lengkap, termasuk foto, video, dan narasi kegiatan secara menyeluruh.

5. Akses Informasi oleh Masyarakat

Masyarakat dapat mengakses informasi kegiatan dengan cara memindai QR Code menggunakan perangkat digital seperti telepon pintar. Setelah dipindai, masyarakat akan

langsung diarahkan ke dokumentasi kegiatan yang telah dipublikasikan sehingga informasi dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan transparan.

6. Terwujudnya Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya publikasi melalui media sosial dan akses QR Code, informasi kegiatan pemberdayaan menjadi lebih terbuka dan transparan. Masyarakat dapat mengetahui secara langsung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pada tahap akhir, keterbukaan informasi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa. Masyarakat menjadi lebih aktif, memahami program pemerintah, serta turut mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dilakukan terhadap jumlah publikasi dan jangkauan media sosial.
2. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat keterlibatan (engagement) masyarakat.
3. Masukan masyarakat digunakan untuk meningkatkan kualitas konten publikasi.
4. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk pengembangan inovasi.